Jurnal Interelasi Vol. 1 No.4 Juli 2025
Halaman 340-346. ISSN: p: 3090-952x, e:3090-2533

PEMERINTAH LOKAL DAN DESENTRALISASI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION: IMPROVING PEOPLE'S WELFARE

Putra Janaz Alfinalis
Universitas Muhammadiyah Jember
Program Studi Ilmu Pemerintahan
e-mail: *putrabwi16@gmail.com*

ABSTRAK

Desentralisasi dan pemerintahan daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, desentralisasi adalah proses pengalihan sebagian kekuasaan dan akuntabilitas dari pemerintah federal ke pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya secara lebih efektif, dan bereaksi terhadap dinamika sosial yang terjadi di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih besar bebas membuat dan melaksanakan kebijakan yang lebih relevan dan sejalan dengan keadaan setempat. Desentralisasi juga meningkatkan keterlibatan publik, mendorong tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, serta memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang dikelola secara efektif dapat memiliki dampak yang signifikan serta membangun tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan transparan,pemerintahan yang dijalankan secara efektif dapat melakukan peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil.

Kata kunci: Desentralisasi, Pemerintahan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Decentralization and local governance are key factors in promoting the advancement of people's welfare. To make decisions that better suit the needs of local communities, decentralization is the process of transferring some power and accountability from the federal government to local governments. To improve public services, manage resources more effectively, and react to social dynamics at the local level, local governments with greater authority are free to make and implement policies that are more relevant and in line with local circumstances. Decentralization also increases public engagement, promotes more accountable and transparent governance, and provides communities with opportunities to actively participate in the development process. Therefore, effectively managed local governments can have a significant impact and build more accountable and transparent governance, effectively run governments can perform an important role in promoting more sustainable and equitable community welfare.

Keywords: *Decentralization, Regional Government, Public Welfare.*

Jurnal Interelasi Vol. 1 No.4 Juli 2025
Halaman 340-346. ISSN: p: 3090-952x, e:3090-2533

PENDAHULUAN

Pemerintahan lokal memegang peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara yang luas dan beragam seperti Indonesia, kebutuhan lokal yang berbeda-beda menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dari pemerintah daerah. Desentralisasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pendekatan ini, dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Konsep desentralisasi mencerminkan semangat demokratisasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan wilayah mereka, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Pemerintah lokal, dengan posisi yang lebih dekat dengan masyarakat, memiliki peluang besar untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di daerahnya secara langsung.

Namun demikian, penerapan desentralisasi di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pasca-Reformasi, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014, implementasi desentralisasi menghadapi berbagai kendala struktural, seperti kapasitas kelembagaan daerah yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah. Di sisi lain, pelaksanaan desentralisasi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di tingkat lokal, jika tidak diimbangi dengan sistem akuntabilitas dan transparansi yang kuat.

Meskipun terdapat hambatan, berbagai studi menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperkuat kebijakan desentralisasi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan lokal dan desentralisasi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam pengalaman dan dinamika yang terjadi di lapangan, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai faktor pendukung serta tantangan utama yang memengaruhi efektivitas desentralisasi dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pemerintahan Lokal dan Desentralisasi

Pemerintahan lokal merupakan sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan di tingkat daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan publik di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Desentralisasi, dalam konteks ini, adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Rondinelli (1981) mendefinisikan desentralisasi sebagai pemindahan kekuasaan administratif, fiskal, dan politik kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Dengan demikian, desentralisasi menciptakan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan karakteristik lokal masing-masing.

Tiebout (1956) membedakan desentralisasi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Desentralisasi administratif, berkaitan dengan pelimpahan tugas teknis dan birokratis;
2. Desentralisasi fiskal, menyangkut distribusi anggaran dan pendapatan;
3. Desentralisasi politik, berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.

2. Pentingnya Desentralisasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Desentralisasi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah. Oates (1972) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat lokal cenderung lebih efisien karena didasarkan pada informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan desentralisasi secara resmi dimulai melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih otonom dalam pengelolaan kebijakan pembangunan.

3. Desentralisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Smoke (2003) menyoroti bahwa desentralisasi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui tiga aspek utama:

1. Efisiensi alokasi sumber daya, karena pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih baik terhadap kebutuhan lokal;
2. Akuntabilitas, karena masyarakat dapat secara langsung menilai kinerja pejabat daerah;
3. Partisipasi publik, karena masyarakat memiliki ruang untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka.

Penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan publik di daerah yang menerapkan desentralisasi secara optimal. Misalnya, sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan perbaikan melalui program beasiswa, peningkatan sarana belajar, serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas.

Reksodiputro (2006) menambahkan bahwa otonomi daerah juga mampu mendorong perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

4. Tantangan Implementasi Desentralisasi

Meskipun menawarkan banyak manfaat, desentralisasi menghadapi sejumlah tantangan serius. Fritzen (2007) mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pusat, yang kerap kali tidak mencerminkan kebutuhan spesifik daerah.

Selain itu, Taba (2012) memperingatkan akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di tingkat lokal jika mekanisme akuntabilitas dan transparansi tidak diperkuat. Implementasi desentralisasi yang tidak merata juga dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah, khususnya bagi daerah dengan kapasitas ekonomi dan SDM yang rendah.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menekankan bahwa meskipun desentralisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Jurnal Interelasi Vol. 1 No.4 Juli 2025
Halaman 340-346. ISSN: p: 3090-952x, e:3090-2533

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak pemerintahan lokal dan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang ada di lapangan, terutama terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan desentralisasi di tingkat daerah serta persepsi masyarakat mengenai dampak kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintahan lokal dan desentralisasi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana kebijakan desentralisasi diterapkan dan diimplementasikan di beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Pemerintahan Lokal dan Desentralisasi: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal peningkatan layanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, maupun partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, juga terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan dampak positif dari desentralisasi tersebut.

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Salah satu hasil utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa desentralisasi memberikan keleluasaan lebih bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan masyarakat, banyak daerah yang menunjukkan peningkatan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Contohnya, di beberapa kabupaten yang berhasil menerapkan desentralisasi, terdapat peningkatan kualitas pendidikan dengan adanya program beasiswa dan peningkatan sarana pendidikan, seperti sekolah yang lebih layak dan lebih dekat dengan masyarakat. Demikian pula, sektor kesehatan di beberapa daerah mengalami kemajuan dengan adanya pembangunan puskesmas baru dan pengalokasian dana yang lebih efisien untuk layanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan Infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam kebijakan desentralisasi, di mana beberapa daerah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat kota, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

2. Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Efisien

Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lebih baik karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa daerah yang memiliki otonomi lebih besar mampu mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, seperti dalam pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun, terdapat variasi dalam kualitas pengelolaan sumber daya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa daerah, meskipun otonomi lebih besar, ketergantungan pada dana alokasi umum dari pemerintah pusat masih tinggi, yang memengaruhi fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Desentralisasi membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Hasil dari Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa

masyarakat merasa lebih dihargai dan didengarkan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka. Masyarakat di beberapa daerah menyatakan bahwa mereka kini lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah melalui forum musyawarah desa atau partisipasi dalam rapat kerja pemerintah daerah.

Namun, partisipasi ini masih terbatas pada beberapa daerah yang sudah lebih maju dalam hal pendidikan politik masyarakat. Di daerah-daerah yang lebih terpencil, partisipasi masyarakat masih terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemerintahan, serta terbatasnya akses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

4. Tantangan dalam Implementasi Desentralisasi

Meskipun banyak dampak positif dari desentralisasi, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya:

1. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah: Di beberapa daerah, terutama yang memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas, kemampuan untuk mengelola otonomi daerah masih kurang optimal. Banyak pemerintah daerah yang kekurangan tenaga ahli dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang berisiko menurunkan efektivitas kebijakan yang diambil.
2. Ketimpangan Antar Daerah: Ketimpangan dalam hal pendapatan daerah dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar. Beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi terbatas sulit untuk membiayai program-program pembangunan yang signifikan tanpa bantuan dana dari pusat. Hal ini menghambat upaya pemerataan pembangunan antar daerah.
3. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran: Salah satu kendala yang ditemukan adalah potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana daerah. Meski desentralisasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas, praktik korupsi yang terjadi di tingkat lokal masih menjadi masalah yang perlu diatasi agar desentralisasi dapat efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi

Desentralisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Di beberapa daerah, dengan adanya kebijakan desentralisasi yang memungkinkan adanya pengalokasian dana untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil, masyarakat merasa lebih berdaya dan mandiri.

Namun, dampak sosial dan ekonomi ini tidak langsung terasa merata di seluruh daerah. Beberapa daerah yang memiliki kapasitas sumber daya manusia dan keuangan yang lebih rendah belum dapat merasakan manfaat yang sama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana dan program-program pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan pemerintahan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan partisipatif. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh otonomi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Salah satu dampak positif yang paling nyata dari desentralisasi adalah meningkatnya kualitas layanan publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Daerah-daerah yang mampu mengelola otonomi dengan baik menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan

layanan yang merata dan berdaya guna. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien juga tercermin dari kemampuan beberapa pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi lokal.

Partisipasi masyarakat juga meningkat seiring dengan terbukanya ruang-ruang publik untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik demokrasi lokal yang lebih inklusif.

Namun, keberhasilan desentralisasi tidak merata di seluruh daerah. Tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, ketimpangan fiskal antarwilayah, dan potensi penyalahgunaan kewenangan masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa daerah masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat dan belum mampu mengelola otonomi secara mandiri. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang rendah.

Oleh karena itu, meskipun desentralisasi memberikan potensi besar dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, maka desentralisasi akan menjadi landasan kuat bagi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Untuk memaksimalkan dampak positif desentralisasi, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu diberikan pelatihan dan pendidikan terkait manajemen anggaran, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan dana, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Pembentukan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti forum pengawasan publik, bisa menjadi salah satu solusi. Masyarakat perlu diberi ruang untuk memantau dan mengevaluasi jalannya kebijakan yang diterapkan.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Agar desentralisasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat mekanisme partisipasi publik, seperti musyawarah desa atau forum konsultasi publik, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memberi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Penyuluhan dan Edukasi Politik untuk Masyarakat

Masyarakat di daerah yang lebih terpencil sering kali kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam pemerintahan dan proses desentralisasi. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai desentralisasi, hak-hak politik, dan cara berpartisipasi dalam pemerintahan sangat penting. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, atau media lokal.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Agar kebijakan desentralisasi dapat berfungsi dengan optimal, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pelaksanaan desentralisasi di setiap daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk daerah yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Y., & Prakoso, A. (2019). Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Konsep, Implementasi, dan Tantangannya. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Benedikt, R., & Mulyani, D. (2020). Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Boli, A. (2015). The Role of Local Governments in Sustainable Development and Welfare: A Comparative Analysis. Journal of Local Government Studies, 24(2), 105-121.

Darmawan, I. (2018). Desentralisasi: Dinamika dan Implikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Fauzi, S., & Ahmad, N. (2017). Desentralisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan, 5(3), 209-223.

Ginting, P. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Lokal dan Desentralisasi di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Hardiman, F. (2014). Decentralization and Local Democracy in Indonesia: The Case of the Post-Suharto Period. Journal of Asian Politics, 10(4), 39-56.

Kuncoro, M. (2017). Desentralisasi, Demokrasi, dan Pembangunan Daerah: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi. Jakarta: LP3ES.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Putra, H., & Santosa, D. (2020). Evaluasi Implementasi Desentralisasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 98-112.